

(Review Article)

Pengembangan Model Blue Governance untuk Daerah Pesisir di Indonesia melalui Literature Review

Tri Cahyo Nugroho¹, Andi Rahmat Nizar Hidayat^{2*}

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*Correspondence: andirahmatnizarhidayat@unm.ac.id

Abstract : *This article synthesizes the literature to formulate an operational blue governance model for Indonesian coastal local governments. Using a systematic literature review (scoping review) of publications from 2000–2025, an initial search of 1,250 records was narrowed to 40 relevant articles. The synthesis identifies three key governance pillars: (1) local autonomy to tailor policies to place-specific contexts; (2) ecosystem integration to link use and conservation (including blue-carbon ecosystems such as mangroves and seagrass); and (3) public participation operationalized through Coastal Deliberation Forums and the institutionalization of local knowledge. Compared with ICZM, MSP, and EBM frameworks, the proposed model is more attuned to Indonesia's decentralization and positions participation as the mechanism for policy legitimacy. Practical implications include embedding the model in RPJMD/RTRW (regional medium-term development and spatial plans), establishing Regional Coastal Councils and a Blue Governance Task Force (state community partnerships), leveraging village funds for blue actions, and implementing participatory monitoring anchored in communities and universities. The recommendations target improved cross-level coordination, management of conservation–development trade-offs, and stronger data systems. The main limitation is the absence of field validation; therefore, mixed-methods studies at pilot sites are recommended. Overall, the model offers a pragmatic framework for inclusive, resilient, and sustainable coastal governance while supporting Indonesia's SDG and NDC commitments.*

Keywords: Blue Governance; Public Participation; Ecosystem Integration; Blue Economy; Coastal Indonesia.

Abstrak: Tujuan penelitian ini ialah mengetahui bagaimana implementasi dan kendala program desa anti korupsi di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi program menurut Charles O. Jones yang menyebutkan tiga aktivitas dasar yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program desa anti korupsi di desa Pakatto yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada pelaksanaannya sudah baik. Dilihat dari organisasi struktural dan integritas sumber daya manusia sudah berjalan dengan optimal. Dari aspek interpretasi, para pelaksana program sudah memahami tujuan dan pedoman program desa. Dalam aspek penerapan, ditemukan realisasi pada pelaksanaan program kerja desa berjalan lancar dengan mengadakan kegiatan coffe morning dengan skema Focus Grup Discussion dan adanya Anjungan Digital Mandiri yang terhubung dengan Website Resmi Desa Pakatto, sehingga segala kegiatan transparan dan memudahkan Masyarakat memberi saran dan kritik.

Kata Kunci: Tata Kelola Biru; Otonomi Daerah; Partisipasi Publik; Integrasi Ekosistem; Ekonomi Biru; Pesisir Indonesia..

1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memegang amanah besar atas kekayaan laut dan pesisirnya. Gagasan ekonomi biru (blue economy) menekankan pembangunan berkelanjutan yang merangkai dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pemanfaatan laut berlangsung bijak. Kerangka ini kian diterima secara global sebagai cara mengatasi degradasi ekosistem pesisir sembari mendorong pertumbuhan. Di Indonesia, ruang ini mencakup perikanan, pariwisata, hingga transportasi maritim yang menyumbang signifikan pada PDB. Namun, praktik eksploitasi yang berlebihan masih menjadi tantangan utama. Sejumlah kajian menunjukkan, ketika dikelola dengan baik, ekonomi biru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Hudaya & Idris, 2023; Razladova & Nyoko, 2022).

Potensi tersebut tampak dari kayanya biodiversitas laut Indonesia dan peluang energi terbarukan berbasis samudra. Wilayah pesisir menopang jutaan penduduk yang bergantung pada sumber daya alam ini. Di saat yang sama, polusi, penangkapan berlebih, dan perubahan iklim memperberat tekanan. Ekonomi biru menawarkan arah solusi melalui inovasi dan kebijakan yang ramah lingkungan. Literatur juga mendorong penguatan konsep “blue-green economy” guna menyokong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran penting di Indo-Pasifik. Tantangan kunci terletak pada integrasi filosofi lokal seperti Tri Dharma Sambernyawa agar nilai keberlanjutan lebih membumi (Sungkawati, 2024; Wang, 2025).

Di tingkat kebijakan, pemerintah telah mendorong ekonomi biru melalui peta jalan industri rumput laut dan pengembangan ekowisata pesisir. Meski demikian, implementasi di daerah sering tersendat karena koordinasi antarlembaga yang belum padu. Literatur menilai, penguatan ekonomi biru

di koridor seperti Sulawesi dengan fokus pada perikanan berkelanjutan dan akuakultur dapat menggerakkan pertumbuhan sekaligus melindungi ekosistem. Di Maluku, kebijakan yang memajukan praktik perikanan berkelanjutan mulai menunjukkan hasil, walau kebutuhan inovasi masih menonjol (Hudaya & Idris, 2023; Razladova & Nyoko, 2022).

Desakan degradasi sumber daya mulai dari hilangnya mangrove hingga terumbu karang memerlukan pendekatan yang menyatukan konservasi dengan pengembangan ekonomi. Temuan global menegaskan peran penting pengetahuan lokal dalam tata kelola blue carbon. Di Indonesia, usulan pengelolaan ekosistem berbasis otonomi daerah mengemuka untuk menekan kerentanan. Namun, kerangka kebijakan nasional kerap belum selaras dengan realitas setempat sehingga efektivitasnya terbatas (Sungkawati, 2024; Wang, 2025).

Tantangan tata kelola di wilayah pesisir meliputi kerentanan terhadap degradasi yang diperparah oleh kebijakan nasional yang kurang adaptif. Ketika aspek lokal terabaikan, pengelolaan menjadi kurang tepat sasaran, berdampak pada keanekaragaman hayati dan mata pencaharian warga pesisir. Karenanya, analisis kerentanan menjadi penting untuk membangun resiliensi, khususnya di pulau-pulau kecil (Ferrol-Schulte et al., 2015; Singh et al., 2021).

Perubahan iklim memperbesar risiko, termasuk kenaikan muka air laut yang mengancam permukiman dan ekosistem. Diperlukan strategi adaptasi melalui tata kelola pesisir yang terintegrasi. Sejumlah studi kasus menunjukkan kurangnya harmonisasi kebijakan regional menghambat respons terhadap sea level rise. Di Indonesia, peluang membangun strategi adaptasi tersedia, tetapi hambatan hukum dan kelembagaan masih terasa. Pendekatan berbasis komunitas berpotensi menjadi pengungkit keberhasilan (Nurhidayah et al., 2022; Talib et al., 2022).

Sejarah tata kelola maritim Indonesia selama berabad-abad menunjukkan jejak kebijakan yang membuat upaya keberlanjutan sering

terseok. Reformasi pasca-1998 membuka ruang desentralisasi, meski implementasi di tingkat desa belum konsisten. Literatur menekankan pentingnya forum warga dan mekanisme kelembagaan desa pesisir untuk memperkuat partisipasi. Koordinasi antara pusat dan daerah tetap menjadi pekerjaan rumah (Ferrol-Schulte et al., 2015; Singh et al., 2021).

Integrasi kebijakan regional mengenai blue carbon dan ekosistem pesisir masih lemah, padahal potensinya besar untuk menyumbang pada Nationally Determined Contributions (NDCs). Keterbatasan data dan kapasitas lokal menjadi kendala. Karena itu, kerangka tata kelola yang adaptif diperlukan untuk menjawab dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur pesisir (Nurhidayah et al., 2022; Talib et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan menyusun model “blue governance” bagi pemerintah daerah pesisir melalui telaah pustaka (literature review). Model diarahkan untuk mengintegrasikan kebijakan ekowisata perbatasan pesisir dengan prinsip keberlanjutan. Literatur menunjukkan pendekatan semacam ini dapat memperkuat pengelolaan ekosistem dalam kerangka otonomi daerah. Pembelajaran dari praktik internasional misalnya Funaya di Jepang relevan untuk melindungi ruang hidup komunitas seperti suku Bajo (Alfiandri & Mayarni, 2023; Anwar et al., 2023).

Kajian ini mengisi celah dengan mensintesis literatur tentang tata kelola nasional dan lokal demi pencapaian SDGs di Indonesia. Perbandingan dengan Jepang membuka peluang reformasi kebijakan. Model yang diajukan diharapkan menopang terwujudnya “desa biru” yang bertumpu pada potensi dan kearifan setempat (Morita et al., 2019; Permani et al., 2024).

Pendekatan berbasis masyarakat untuk ekowisata berkelanjutan menjadi pilar model, agar aspek keadilan sosial berjalan beriring dengan kelestarian ekosistem. Literatur menyoroti peran “blue tourism” dalam merawat ekosistem laut sekaligus mengangkat daya saing pariwisata maritim. Sinergi dana desa dengan prinsip ekonomi biru dipandang dapat

meningkatkan kesejahteraan warga (Phelan et al., 2020; Supriyanto, 2022; Tambun et al., 2025).

Pada akhirnya, model blue governance ini ditujukan sebagai kerangka praktis bagi pemerintah daerah, yang merangkum unsur sosial, lingkungan, dan ekonomi. Berbasis tinjauan pustaka, penelitian ini berkontribusi pada diskursus pembangunan berkelanjutan di Indonesia, seraya menekankan pentingnya adaptasi kebijakan lokal untuk menjawab tantangan global (Alfiandri & Mayarni, 2023; Anwar et al., 2023).

Konsep Blue Economy dan Governance

Konsep blue economy dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sembari merawat kesehatan ekosistem. Di Indonesia, pendekatan ini mengandalkan analisis jejaring proses governance blue carbon, yakni kolaborasi lintas stakeholder dalam pengelolaan ekosistem pesisir seperti mangrove dan seagrass. Berbagai kajian menekankan kebutuhan menyinergikan kebijakan nasional dengan inisiatif tingkat wilayah guna menanggapi degradasi lingkungan. Karena itu, blue economy tidak hanya menimbang aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan, agar manfaatnya sampai pada masyarakat lokal melalui partisipasi yang aktif. Studi kasus di Indonesia menunjukkan peluang besar di perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan, meskipun keterbatasan data masih menjadi tantangan (Ayostina et al., 2022; Contreras & Thomas, 2019).

Pengetahuan lokal menempati posisi penting dalam governance blue carbon, terutama di kawasan Indian Ocean Region di mana komunitas pesisir memiliki kearifan konservasi dan adaptasi. Di Indonesia, penerapan konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) pada blue economy mendapat dorongan selama chairmanship Indonesia di ASEAN 2023, dengan perhatian pada kawasan Indo-Pacific untuk memajukan investasi yang berkelanjutan. Langkah ini membantu menekan dampak lingkungan

sekaligus memperkuat akuntabilitas sosial. Literatur juga menggarisbawahi bahwa pengintegrasian filosofi Jawa seperti Tri Dharma Sambernyawa dapat memperkaya tata kelola menuju capaian blue economy yang lebih utuh. Namun, pekerjaan rumah utama adalah menyelaraskan kebijakan pusat dengan praktik lapangan di tingkat lokal (Febrianti' et al., 2024; sustainability, 2023).

Blue accounting literacy menjadi unsur kunci di sektor pariwisata Indonesia karena prinsip blue economy menuntut transparansi finansial dan keberlanjutan operasional. Temuan penelitian menunjukkan literasi ini membantu pelaku UMKM menyesuaikan praktik, termasuk pelaporan dampak lingkungan, agar sejalan dengan prinsip blue economy. Di Maluku, kebijakan yang memajukan perikanan dan akuakultur berkelanjutan masih membutuhkan inovasi teknologi, tetapi peluang untuk mencapai blue economies yang tangguh tetap besar. Tata kelola yang efektif memerlukan kerja bersama pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk mengatasi hambatan seperti akses permodalan. Kajian ini menekankan arti penting kebijakan yang menopang transisi menuju ekonomi biru melalui pendidikan dan regulasi (Ikhsan et al., 2024; Kobayashi, 2023).

Di koridor ekonomi Sulawesi, blue economy dikaitkan dengan akselerasi pertumbuhan melalui integrasi sektor maritim dan industri darat. Model ini dipandang membuka lapangan kerja baru sambil menjaga keseimbangan ekologis lewat praktik berkelanjutan. Pemetaan traktat multi-regional bagi blue economy di Indonesia memperlihatkan peluang kolaborasi internasional, terutama dalam perdagangan maritim dan investasi infrastruktur. Meski demikian, pelaksanaannya menuntut kerangka hukum yang kokoh agar konflik kepentingan antarnegara dapat dihindari. Literatur juga menyoroti pentingnya zero waste pattern bagi UMKM untuk menekan limbah dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya (Marjani et al., 2025; Meliala, 2024; Mujahidin & Paramita, 2021).

Pemanfaatan dana desa dalam kerangka blue economy di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan kesejahteraan melalui program berkelanjutan, seperti pengembangan ecotourism pesisir. Kebijakan ini dibaca sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang menuntut alokasi dana yang transparan. Di sisi lain, pembangunan indeks blue economy tingkat provinsi berbasis analisis faktor eksploratori memberi potret kemajuan yang lebih menyeluruh. Indeks tersebut merangkum indikator ekonomi (misalnya PDB maritim), sosial (misalnya tingkat kemiskinan), dan lingkungan (misalnya cakupan mangrove). Tantangannya, ketersediaan data yang andal dan ketepatan metodologi masih perlu diperkuat (Rangkuti et al., 2024; Sari & Oktora, 2025).

Sebagai bagian dari blue economy, blue tourism menekankan perlindungan ekosistem laut sambil mengembangkan destinasi ramah lingkungan. Pendekatan ini lazim berbasis komunitas, sehingga upaya konservasi sejalan dengan penyediaan pendapatan alternatif bagi nelayan. Literatur menunjukkan blue tourism berpotensi menjadi driver ekonomi penting, tetapi membutuhkan tata kelola yang kuat untuk mencegah degradasi habitat. Keterhubungan dengan kebijakan nasional, termasuk pengaturan jumlah pengunjung, menjadi prasyarat keberlanjutan jangka panjang. Beberapa studi kasus di Bali dan Raja Ampat memberikan hasil yang menggembirakan, walau isu aksesibilitas dan promosi global masih perlu diatasi (Ayostina et al., 2022; Supriyanto, 2022).

Tata kelola blue economy menuntut pendekatan holistik yang menyatukan dimensi global dan lokal agar pemanfaatan sumber daya laut lebih optimal. Di Indonesia, analisis jejaring memperlihatkan kompleksitas proses blue carbon governance, dengan peran pemerintah, LSM, pelaku usaha, dan komunitas. Pengetahuan lokal masyarakat pesisir dapat memperkuat kebijakan, khususnya dalam pengelolaan blue carbon untuk mitigasi iklim. Meski begitu, kurangnya koordinasi antarlembaga masih sering menghambat efektivitas implementasi. Literatur mendorong inovasi

kebijakan termasuk pemanfaatan teknologi monitoring untuk menekan degradasi dan memastikan keadilan distribusi manfaat (Contreras & Thomas, 2019; Febrianti' et al., 2024).

Nilai-nilai lokal seperti Tri Dharma Sambernyawa juga dapat diarusutamakan ke dalam tata kelola guna memajukan blue economy melalui harmonisasi prinsip keberlanjutan dan budaya. Pada sektor pariwisata, blue accounting literacy membantu pengukuran dampak lingkungan secara lebih presisi, sekaligus menopang transisi UMKM ke praktik yang berkelanjutan. Tantangan yang muncul adalah proses adaptasi pelaku usaha, yang memerlukan pelatihan dan dukungan kebijakan. Temuan-temuan ini menegaskan potensi kearifan tradisional untuk memperkaya kerangka global blue economy (Ikhsan et al., 2024; sustainability, 2023),

Penguatan perikanan berkelanjutan di Maluku memperlihatkan sekaligus peluang dan kendala dalam agenda blue economy, dengan kebutuhan inovasi agar sasaran SDGs lebih mudah dicapai. Di koridor Sulawesi, blue economy mendorong pertumbuhan melalui kebijakan percepatan termasuk integrasi akuakultur dengan rantai pasok global. Kolaborasi regional diperlukan untuk menahan overfishing dan polusi, sementara keberhasilan jangka panjang mensyaratkan pemantauan yang ketat. Literatur ini memberi gambaran bagaimana kebijakan lokal yang tepat dapat menopang kinerja ekonomi nasional (Kobayashi, 2023; Marjani et al., 2025).

Traktat multi-regional untuk blue economy membuka ruang kemitraan di Indonesia, dengan fokus pada perdagangan maritim dan investasi bersama. Penerapan zero waste pattern bagi UMKM mendukung peralihan menuju ekonomi biru melalui pengurangan limbah dan sirkularitas bahan. Meskipun manfaat ekonominya besar, penataan kerangka hukum internasional tetap krusial untuk mencegah konflik dan menyamakan standar lintas negara. Kajian-kajian tersebut menekankan peran UMKM dalam inovasi berkelanjutan (Meliala, 2024; Mujahidin & Paramita, 2021).

Di Sumatera Utara, dana desa yang diarahkan pada program pesisir misalnya budidaya rumput laut terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Indeks pembangunan blue economy berbasis analisis faktor membantu mengevaluasi capaian antardaerah secara holistik dan memberi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih tajam. Alokasi yang tepat sasaran berpotensi menurunkan kemiskinan, meski verifikasi data masih perlu ditingkatkan agar evaluasi lebih akurat (Rangkuti et al., 2024; Sari & Oktora, 2025)

Akhirnya, blue tourism memperkuat potensi maritim Indonesia dengan menempatkan kelestarian ekosistem sebagai fondasi termasuk ecotourism berbasis komunitas. Keberhasilan jangka panjang mensyaratkan kaitan yang erat dengan tata kelola lokal untuk mencegah overtourism. Kontribusinya terhadap PDB nasional menjanjikan, namun strategi promosi terutama melalui kanal digital perlu terus disempurnakan agar keseimbangan antara manfaat ekonomi dan konservasi tetap terjaga (Supriyanto, 2022).

Governance di Daerah Pesisir

Pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam menjaga kelangsungan pemerintahan lokal yang demokratis lewat penerapan otonomi dan desentralisasi. Kedua prinsip ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, ciri sosial, dan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing (Hidayat, 2025).

Pemerintahan desa di Indonesia mengalami perubahan bertahap sejak penguatan kerangka demokrasi pada 2003, dengan penekanan pada pembangunan pedesaan pesisir melalui desentralisasi. Literatur menunjukkan bahwa desentralisasi membuka ruang partisipasi publik lewat civil forum dan penguatan mekanisme kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya laut. Meski demikian, keterbatasan kapasitas lokal dan pendanaan sering membatasi hasil di lapangan. Gagasan perlindungan ruang hidup masyarakat Bajo yang diadaptasi dari model Funaya di Jepang

menawarkan jalur adaptasi berkelanjutan yang merangkai kearifan lokal dengan teknologi mutakhir. Pendekatan ini mendukung konservasi pesisir sekaligus menjaga identitas budaya komunitas adat (Antlöv, 2003; Asnaedi et al., 2025).

Kerangka dukungan bagi perubahan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil menempatkan governance yang adaptif sebagai kunci untuk merespons erosi dan banjir, sembari mendorong partisipasi warga melalui civil forum. Di Indonesia, model pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan berbasis potensi serta kearifan lokal menuju Blue Villages diajukan sebagai solusi inovatif. Penguatan mekanisme kelembagaan dan civil forum di desa pesisir membantu memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, koordinasi antarlembaga pemerintah masih menjadi persoalan penting yang memerlukan pembenahan struktural. Berbagai studi melihat Blue Villages berpotensi mengintegrasikan blue economy dengan pelestarian lingkungan (Glaser et al., 2018; Kunyati et al., 2024; Nurlinah & Haryanto, 2020).

Penguatan governance ekosistem blue carbon di Indonesia membuka peluang kontribusi terhadap Nationally Determined Contributions (NDCs), terutama melalui konservasi mangrove dan seagrass dengan pelibatan publik. Penataan ulang kebijakan permukiman pesisir dalam kerangka blue economy seperti yang dipraktikkan di Pulau Bintan menunjukkan diskursus dan praktik adaptif untuk menjawab perubahan iklim. Paradigma baru pengelolaan mangrove menempatkan blue carbon sebagai instrumen penting bagi mitigasi global. Di sisi lain, keterbatasan dana dan kapasitas teknis di tingkat daerah masih mengemuka. Literatur merekomendasikan penyatuan kebijakan nasional dengan inisiatif lokal agar implementasi lebih efektif (Prihatiningtyas et al., 2024; Safitri et al., 2024; Sidik et al., 2023).

Manajemen adaptif untuk governance sanitasi pesisir di Jakarta mengaitkan ketangguhan komunitas dengan program 100-0-100 dalam pengelolaan limbah, sambil memperkuat peran civil forum untuk

memperluas keterlibatan warga. Pendekatan keberlanjutan yang menekankan keadilan sosial–lingkungan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan pesisir berbasis blue economy memerlukan pelaksanaan yang konsisten agar tujuan lingkungan dan sosial tercapai. Penelitian menegaskan arti kolaborasi pemerintah daerah–masyarakat untuk menekan polusi, serta kebutuhan inovasi teknologi dan pendidikan. Keadilan dalam distribusi manfaat blue economy menjadi perhatian utama (Sofiyah & Suryawan, 2025; Tarigan & Ferdinanto, 2024; Ujianti et al., 2025).

Kerangka governance konservasi biodiversitas pada tingkat administrasi regional menekankan perlindungan kearifan lokal dan lingkungan melalui kebijakan terpadu, dengan partisipasi publik sebagai penggerak keterlibatan. Kebijakan sustainable ocean di Indonesia membuka jalan menuju visi kemaritiman nasional dengan menyatukan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Bukti penelitian menunjukkan pendekatan ini dapat memperkuat resiliensi terhadap ancaman global seperti perubahan iklim, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Wawasan ini memberi arah bagaimana regional governance dapat menopang capaian SDGs secara efektif (Wardhani et al., 2025; Wuwung et al., 2024).

Desentralisasi governance desa pesisir sejak 2003 telah memberi dorongan bagi pembangunan pedesaan, meski tantangan kapasitas belum sepenuhnya teratasi. Civil forum membantu memperluas partisipasi publik. Adaptasi model Funaya untuk komunitas Bajo memperkuat perlindungan ruang hidup yang berkelanjutan dengan memadukan nilai budaya dan konservasi. Partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor penentu, walau keterbatasan pendanaan masih membatasi skala program. Karena itu, pembaruan kelembagaan dibutuhkan untuk efisiensi yang lebih baik (Antlöv, 2003; Asnaedi et al., 2025)

Kerangka inovatif untuk perubahan pesisir di pulau kecil menekankan adaptasi berbasis kolaborasi, dengan partisipasi publik yang memperdalam keterlibatan komunitas. Model Blue Villages yang bertumpu pada kearifan lokal mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan ecotourism. Penguatan civil forum memperkuat institusi lokal, sementara masalah koordinasi antarlembaga menuntut solusi yang lebih kreatif. Literatur menyediakan panduan untuk memperkuat resiliensi komunitas (Glaser et al., 2018; Nurlinah & Haryanto, 2020).

Peningkatan blue carbon governance memberi peluang nyata bagi pencapaian NDCs melalui konservasi mangrove, dengan pelibatan masyarakat lewat civil forum. Penataan ulang kebijakan permukiman di Bintan dalam kerangka blue economy mencerminkan praktik adaptif, dan mempertegas pentingnya blue carbon bagi pengelolaan pesisir. Keterbatasan pendanaan menunjukkan kebutuhan dukungan internasional, sementara integrasi kebijakan tetap menjadi kunci (Prihatiningtyas et al., 2024; Safitri et al., 2024; Sidik et al., 2023).

Pendekatan manajemen adaptif untuk sanitasi pesisir Jakarta memperkuat ketangguhan komunitas melalui program 100-0-100, dengan partisipasi publik yang makin intensif. Upaya keberlanjutan dan keadilan maritim mendukung peningkatan kesejahteraan pesisir. Pengelolaan berbasis blue economy membantu pencapaian sasaran lingkungan; kolaborasi lintas aktor penting untuk mengatasi polusi, dan inovasi teknologi menjadi penopang utama adaptasi (Sofiyah & Suryawan, 2025; Tarigan & Ferdinanto, 2024; Ujianti et al., 2025).

Kerangka konservasi biodiversitas tingkat regional menjaga kearifan lokal melalui administrasi terpadu, dengan partisipasi publik sebagai instrumen utama. Kebijakan sustainable ocean memperkuat agenda kemaritiman Indonesia. Integrasi sosial-ekonomi diperlukan untuk mewujudkan SDGs, sementara koordinasi pusat-daerah menjadi prasyarat implementasi yang efektif. Wawasan ini berkontribusi pada penguatan

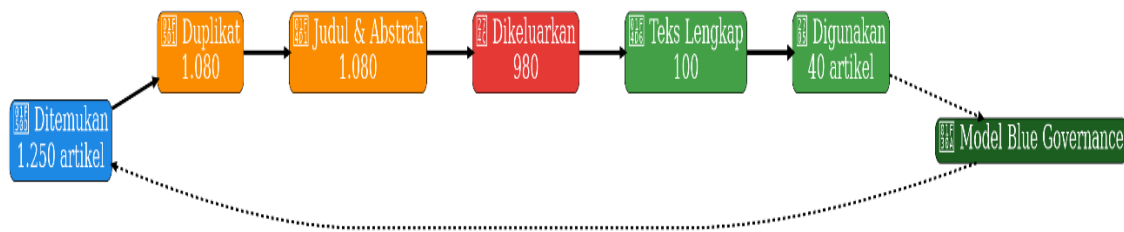
resiliensi di tengah perubahan global (Wardhani et al., 2025; Wuwung et al., 2024).

Perkembangan governance desa pesisir menegaskan peran desentralisasi dalam memperluas partisipasi, dengan civil forum sebagai penguat keterlibatan publik. Upaya perlindungan masyarakat Bajo yang terinspirasi Funaya memperlihatkan bagaimana konservasi budaya dapat berjalan berdampingan dengan perlindungan ruang hidup. Peningkatan kapasitas lokal dan penguatan pendanaan tetap diperlukan, sementara reformasi kelembagaan menjadi landasan efisiensi (Antlöv, 2003; Asnaedi et al., 2025)

Pendekatan adaptif untuk governance perubahan pesisir di pulau kecil menempatkan partisipasi masyarakat sebagai prioritas. Blue Villages mendorong pembangunan yang menghargai kearifan lokal, memperkuat institusi melalui civil forum, dan menawarkan jalan keluar bagi masalah koordinasi. Fokus akhirnya adalah resiliensi komunitas yang berkelanjutan (Glaser et al., 2018; Kunyati et al., 2024; Nurlinah & Haryanto, 2020).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review yang sistematis untuk merumuskan model blue governance di wilayah pesisir Indonesia. Penelusuran dilakukan pada basis data akademik dengan kata kunci “blue governance”, “coastal Indonesia”, dan “regional autonomy”. Kriteria inklusi mencakup publikasi peer-reviewed tahun 2000–2025 yang membahas governance lingkungan pesisir. Analisis tematik mengadopsi scoping review untuk menyintesis praktik manajemen pesisir terpadu (integrated coastal management), sehingga bukti yang dihimpun lebih komprehensif dan meminimalkan bias. Pendekatan ini mendukung pengembangan model yang adaptif dan peka konteks (Partelow et al., 2020). Alur seleksi artikel disajikan pada Gambar 1 (PRISMA).



Gambar 1. Alur Pemilihan Artikel (PRISMA),

Sumber: Penulis, 2025.

Dari 1.250 temuan awal di Scopus, Google Scholar, Garuda, dan Sinta (kata kunci: blue governance, pesisir Indonesia, otonomi daerah), proses penyaringan menghasilkan 40 artikel yang dinilai berkualitas untuk membangun Model Blue Governance Tiga Pilar.

Integrasi teori dilakukan melalui framework praktis yang memandu perancangan, implementasi, dan evaluasi governance lingkungan, dengan penyesuaian pada konteks otonomi daerah Indonesia (Bennett & Satterfield, 2018). Kami menerapkan pendekatan adaptasi berbasis resiliensi (resilience-based adaptation) untuk menghadapi kompleksitas sosial-ekologis pesisir termasuk ancaman perubahan iklim dan degradasi sumber daya (Rölfer et al., 2022). Analisis kualitatif mencakup coding tema dan triangulasi data dari beragam studi kasus nasional. Metodologi ini memperkuat validitas model yang diusulkan, seraya kami akui keterbatasannya yakni masih terbatasnya data empiris primer pada sejumlah wilayah.

3. Hasil Dan Pembahasan

Sintesis literatur memperlihatkan pola-pola utama dalam blue governance pada wilayah pesisir Indonesia. Temuan kunci menegaskan bahwa integrasi ekosistem, otonomi daerah, dan partisipasi publik merupakan unsur esensial. Pendekatan ini menuntut penyesuaian kebijakan terhadap kompleksitas sosial-ekologis setempat. Partisipasi warga melalui civil forum dan mekanisme kelembagaan menjadi penghubung antara gagasan dan praktik, sehingga masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan (Ferrol-Schulte et al., 2015).

Hasil tersebut selaras dengan kerangka blue economy global yang menekankan ketangguhan (resilience), namun konteks Indonesia menambahkan dimensi otonomi daerah dan kearifan lokal. Partisipasi publik tidak sekadar alat, melainkan landasan legitimasi kebijakan. Analisis tematik mengidentifikasi lima tema pokok untuk penyusunan model blue governance bagi pemerintah daerah pesisir (Wuwung et al., 2024). Untuk memperkuat temuan, Tabel 1 membandingkan Model Blue Governance dengan pendekatan governance pesisir/kemaritiman lain dalam literatur internasional.

Tabel 1. Perbandingan *Model Blue Governance* dengan Pendekatan *Governance* Lainnya

Aspek Perbandingan	Model Blue Governance (Artikel Ini)	ICZM (Integrated Coastal Zone Management)	MSP (Marine Spatial Planning)	EBM (Ecosystem-Based Management)
Fokus Utama	Menggabungkan blue economy (perikanan, ecotourism) dengan konservasi pesisir; tiga pilar: otonomi daerah, integrasi ekosistem, partisipasi publik.	Pengelolaan zona pesisir terpadu; menyeimbangkan kepentingan ekonomi/sosial dan perlindungan lingkungan.	Perencanaan ruang laut untuk alokasi penggunaan; meminimalkan konflik lintas-sektor (ekonomi vs. ekologi).	Pengelolaan holistik berbasis ekosistem; menjaga integritas dan layanan ekosistem (manusia sebagai bagian sistem).
Skala Implementasi	Lokal-daerah (otonomi daerah pesisir Indonesia; mis. desa biru); adaptif untuk pulau kecil.	Regional/lokal (darat-laut pesisir); kerap lintas batas administratif.	Nasional/regiona l (mis. praktik luar negeri, EU MSP); fokus maritim lepas pantai.	Ekorregional (mencakup ekosistem luas hingga laut dalam); multi-level governance.

Integrasi Stakeholder	Tinggi: partisipasi publik inti melalui Forum Musyawarah Pesisir; melibatkan masyarakat adat (mis. suku Bajo).	Sedang–tinggi: partisipasi stakeholder untuk meredam konflik; inklusif namun sering top–down.	Sedang: kolaborasi lintas sektor (pemerintah– swasta); perhatian pada komunitas lokal lebih terbatas.	Tinggi: menyatukan pengetahuan ilmiah dan lokal untuk pemantauan ekosistem.
Ekonomi vs. Lingkungan	Seimbang: mendorong blue economy berkelanjutan (PDB maritim + konservasi blue carbon); harmonisasi sosial– lingkungan– ekonomi.	Seimbang: menahan degradasi akibat aktivitas manusia melalui tata kelola terpadu.	Ekonomi lebih dominan: optimasi ruang bagi sektor ekonomi sembari menjaga Good Environmental Status (GES).	Lingkungan lebih dominan: konservasi ekosistem menjadi prioritas; manfaat ekonomi mengikuti layanan ekosistem.
Adaptasi Konteks Lokal (Indonesia)	Sangat adaptif: mengintegrasika n kearifan lokal (mis. Tri Dharma Sambenryawa); sesuai otonomi pasca–1998; mendukung SDG 14.	Adaptif: sudah dipraktikkan di Indonesia (mis. roadmap rumput laut); tantangan koordinasi pusat–daerah tetap ada.	Kurang adaptif: cenderung berparadigma nasional/global; berpotensi beririsan dengan hak adat di pesisir.	Adaptif: memperkuat blue carbon (mangrove); selaras dengan inisiatif lokal seperti pengelolaan desa pesisir.
Kekuatan/Kekurangan Relatif	Kekuatan: sangat kontekstual, partisipasi inklusif; Kelemahan: butuh validasi empiris lebih lanjut.	Kekuatan: framework matang untuk integrasi sektor; Kelemahan: risiko fragmentasi governance.	Kekuatan: alat spasial yang jelas untuk cegah konflik; Kelemahan: kurang menyentuh ekosistem darat.	Kekuatan: fokus pada ketangguhan ekosistem; Kelemahan: implementasi lintas–sektor

				tidak selalu mudah.
Aspek Perbandingan	Model Blue Governance (Artikel Ini)	ICZM (Integrated Coastal Zone Management)	MSP (Marine Spatial Planning)	EBM (Ecosystem-Based Management)

Sumber: Diadaptasi dari sintesis literatur (Page et al., 2021 untuk metodologi SLR; Jay et al., 2020; McLeod & Leslie, 2009; serta penelusuran 2021–2025 pada SpringerLink, Ocean Panel, Wikipedia, Reef Resilience, dan ScienceDirect).

Telaah literatur menempatkan integrasi ekosistem sebagai landasan blue governance. Pendekatan lintas sektor yang merajut otonomi daerah dan konservasi sumber daya kelautan menjadi kunci untuk menahan degradasi pesisir. Fragmentasi kebijakan antartingkat pemerintahan kerap memicu kerusakan ekosistem, sehingga dibutuhkan mekanisme kelembagaan yang lebih terstruktur. Partisipasi publik melalui civil forum membantu memasukkan aspirasi lokal ke dalam keputusan, sehingga legitimasi kebijakan meningkat.

Otonomi daerah muncul sebagai pilar operasional blue governance di pesisir Indonesia. Desentralisasi memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal, namun sering berhadapan dengan kapasitas institusi yang belum optimal dan tarik-menarik kepentingan (Wuwung et al., 2024). Partisipasi warga melalui mekanisme musyawarah desa memperkuat pengelolaan mangrove dan perikanan berkelanjutan (Kunyati et al., 2024).

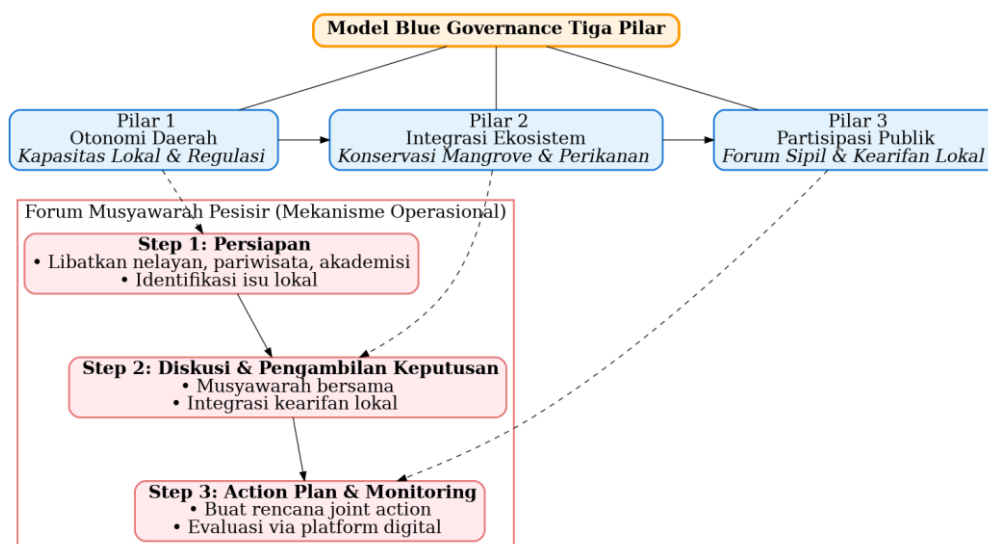
Keterlibatan masyarakat menjadi mekanisme inti resiliensi sosial-ekologis. Civil forum dan konsultasi publik membantu mengintegrasikan pengetahuan tradisional seperti sasi dan awig-awig ke dalam kerangka kebijakan kontemporer (Sidik et al., 2023). Partisipasi tersebut terbukti meningkatkan kepatuhan pada regulasi konservasi dan menurunkan konflik sumber daya melalui keputusan bersama (Ayostina et al., 2022).

Analisis jejaring blue carbon menegaskan pentingnya kolaborasi lintas level. Aktor lokal kerap terpinggirkan dalam pengambilan keputusan nasional, padahal perannya strategis dalam pemantauan dan pemulihan ekosistem. Pelibatan publik lewat civil forum memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi kebijakan (Singh et al., 2021).

Keberhasilan blue economy bergantung pada titik temu antara pemanfaatan dan konservasi. Partisipasi publik berfungsi sebagai mediator antara tuntutan ekonomi dan ekologis melalui mekanisme kelembagaan (Hudaya & Idris, 2023). Pengembangan ecotourism pesisir yang melibatkan komunitas terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga sambil menjaga integritas terumbu karang (Kobayashi, 2023).

Model Blue Governance yang Diusulkan

Bertolak dari temuan utama, model blue governance ditawarkan sebagai kerangka kerja operasional bagi pemerintah daerah pesisir. Model ini merajut tiga pilar esensial otonomi daerah, integrasi ekosistem, dan partisipasi publik yang inklusif untuk menutup celah antara kebijakan nasional dan praktik lokal melalui mekanisme kelembagaan yang adaptif (Alfiandri & Mayarni, 2023). Gambar 2 menyajikan arsitektur model sekaligus alur Forum Musyawarah Pesisir sebagai mekanisme inti.



Gambar 2. Model Blue Governance Tiga Pilar dengan Alur Forum Musyawarah Pesisir

Sumber: Peneliti, 2025.

Dalam rancangan ini, otonomi daerah, integrasi ekosistem, dan partisipasi publik menjadi fondasi bersama. Forum Musyawarah Pesisir berfungsi sebagai ruang operasional pengambilan keputusan kolektif mengadopsi praktik lokal seperti sasi dan awig-awig serta menghasilkan joint action plan yang responsif (Prihatiningtyas et al., 2024). Alurnya meliputi tahap persiapan, diskusi, dan monitoring agar implementasi di pemerintah daerah pesisir berjalan berkelanjutan.

Penekanan ditempatkan pada partisipasi publik sebagai elemen inti, bukan pelengkap. Forum sipil dan pelibatan masyarakat menjadi wahana musyawarah untuk memastikan penyesuaian kebijakan dengan dinamika setempat. Desain model mengusung prinsip adaptif-inklusif dengan kearifan lokal sebagai landasan.

Model blue governance berlandaskan tiga pilar: (1) otonomi daerah untuk memperkuat kapasitas pemerintah pesisir dalam merumuskan regulasi lokal yang selaras dengan arah nasional; (2) integrasi ekosistem agar konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan saling menopang; dan (3) partisipasi publik yang menempatkan forum sipil sebagai arena keputusan kolektif et al., 2024).

Partisipasi publik dioperasionalkan melalui forum yang mempertemukan nelayan, pelaku pariwisata, akademisi, dan pemerintah daerah. Forum memproduksi joint action plan untuk merespons ancaman lokal melalui keputusan bersama. Adaptasi elemen desain permukiman ala Funaya dari Jepang turut mendukung konfigurasi ruang hidup masyarakat Bajo yang berkelanjutan (Asnaedi et al., 2025).

Kearifan lokal diarusutamakan sebagai wujud inklusivitas. Praktik larangan musiman dan pengelolaan terumbu karang berbasis adat menunjukkan efektivitas tinggi dan penerimaan sosial yang baik (Tarigan & Ferdinanto, 2024). Model merekomendasikan pembentukan Dewan Pesisir Daerah dengan mandat konsultatif dalam penyusunan RPJMD dan RZWP3K melalui pelibatan masyarakat (Ujianti et al., 2025).

Model mengadopsi paradigma adaptif dengan peninjauan berkala berbasis umpan balik warga. Partisipasi publik diperluas hingga fase monitoring melalui kanal pelaporan komunitas atau platform digital, guna meningkatkan akuntabilitas dan mencegah dislokasi kebijakan yang bersifat top-down. Pendekatan ini memperkuat keputusan bersama dan menegaskan keterpaduan pusat-daerah dalam praktik.

Implikasi bagi Pemerintah Daerah

Implikasi model ini bagi pemerintah daerah pesisir meliputi penyesuaian kebijakan pada sektor ekowisata, blue carbon, dan mitigasi iklim. Partisipasi publik melalui forum sipil berperan sebagai katalis implementasi, sehingga kebijakan tidak berhenti pada aspek teknis semata, melainkan juga inklusif secara sosial-ekonomi

Pemerintah daerah dapat memasukkan model ini ke dalam RPJMD dan RTRW melalui mekanisme kelembagaan yang melibatkan masyarakat. Pendekatan tersebut memperkuat resiliensi dan legitimasi kebijakan, dengan partisipasi publik dijadikan indikator keberhasilan

Model dapat diterapkan pada pengembangan ekowisata pesisir. Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan publik-swasta-komunitas melalui forum sipil. Keterlibatan masyarakat misalnya lewat koperasi nelayan mendorong pemerataan manfaat ekonomi sekaligus pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab

Pemerintah daerah pesisir dapat memanfaatkan skema NDC dengan melibatkan warga dalam restorasi mangrove melalui mekanisme kelembagaan. Program penanaman berbasis komunitas meningkatkan stok karbon dan memperkuat ketahanan pesisir terhadap banjir. Insentif fiskal direkomendasikan bagi desa yang aktif dalam kegiatan konservasi (Prihatiningtyas et al., 2024; Sidik et al., 2023).

Integrasi data lokal dengan model proyeksi ilmiah dapat dijalankan melalui pembentukan Unit Adaptasi Pesisir. Masyarakat dilibatkan dalam pemetaan kerentanan serta penyusunan protokol evakuasi melalui forum

sipil. Partisipasi publik memastikan kebijakan adaptasi relevan dan mendapat dukungan komunitas (Nurhidayah et al., 2022; Talib et al., 2022)

Program pelatihan bagi aparatur desa dan kelompok masyarakat mengenai prinsip blue governance meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Keterlibatan warga dalam pelatihan memfasilitasi alur pengetahuan dua arah. Alokasi dana desa khusus untuk capacity building direkomendasikan guna menopang keberlanjutan program

Tantangan dan Rekomendasi

Implementasi model menghadapi tantangan struktural dan operasional. Kurangnya koordinasi, konflik kepentingan, dan keterbatasan data menjadi hambatan utama. Rekomendasi difokuskan pada penguatan mekanisme institusional dan partisipasi publik untuk mengatasi tantangan tersebut (Ayostina et al., 2022).

Rekomendasi dirancang sebagai solusi praktis bagi pemerintah daerah pesisir. Partisipasi publik melalui forum sipil menjadi elemen sentral dalam setiap rekomendasi, memastikan adaptasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan (Singh et al., 2021) .

Disparitas Koordinasi Antar-Level Ketidakselarasan kebijakan nasional-regional menjadi kendala utama. Rekomendasi: pembentukan Forum Koordinasi Maritim Daerah yang melibatkan kementerian, provinsi, dan pemerintah daerah pesisir, dengan partisipasi publik melalui forum sipil sebagai observer .

Konflik Kepentingan Konservasi-Pembangunan Tensi antara konservasi dan pertumbuhan ekonomi sering muncul. Rekomendasi: penerapan analisis multi-kriteria dengan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi trade-off melalui pengambilan keputusan bersama Partisipasi publik mencegah marginalisasi nelayan tradisional (Ferrol-Schulte et al., 2015).

Defisit Data Empiris Sebagian besar studi bersifat normatif tanpa validasi lapangan. Rekomendasi: penelitian action research di situs pilot

seperti Teluk Banten atau Sulawesi Utara, dengan partisipasi publik melalui forum sipil sebagai metode dan tujuan.

Keterbatasan Sumber Daya Finansial Kapasitas fiskal daerah terbatas. Rekomendasi: optimalisasi dana desa untuk blue economy dengan alokasi khusus konservasi dan partisipasi publik melalui mekanisme institusional. Skema village fund for blue action menjadi inovasi pembiayaan (Hudaya & Idris, 2023).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis dan kontekstual. Absennya validasi empiris langsung dan fokus pada literatur menjadi batasan utama. Keterbatasan ini diakui untuk mendorong penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Keterbatasan juga mencakup generalisasi dan kedalaman analisis partisipasi publik. Rekomendasi penelitian lanjutan difokuskan pada pengujian model di lapangan dengan keterlibatan masyarakat yang intensif.

Absen Validasi Empiris Langsung Penelitian ini berbasis sintesis literatur tanpa pengujian lapangan. Sebagian referensi bersifat deskriptif tanpa data kuantitatif. Keterbatasan Generalisasi Fokus pada konteks Indonesia membatasi aplikabilitas lintas negara. Variabilitas budaya-geografis antar-daerah pesisir belum terakomodasi secara komprehensif.

Dimensi Partisipasi Publik Diskursus partisipasi publik lebih dominan pada level konseptual; evaluasi dampak jangka panjang melalui keterlibatan masyarakat masih terbatas.

Arah Penelitian Lanjutan Studi mixed-methods direkomendasikan untuk menguji model di 3–5 pemerintah daerah pesisir, dengan fokus pada efikasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan melalui forum sipil.

Ringkasan Implikasi Praktis

Ringkasan implikasi praktis difokuskan pada rekomendasi operasional bagi pemerintah daerah pesisir. Partisipasi publik melalui forum sipil menjadi

elemen inti dalam setiap rekomendasi, memastikan implementasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi ini dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah dengan indikator partisipasi publik yang terukur. Pendekatan ini memperkuat blue governance sebagai paradigma pembangunan pesisir Indonesia.

1. Pembentukan Satuan Tugas Rekomendasi pembentukan Satuan Tugas Blue Governance dengan komposisi 50% aparatur dan 50% perwakilan masyarakat melalui mekanisme institusional.
2. Integrasi ke Dokumen Perencanaan Model diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RTRW dengan indikator partisipasi publik melalui forum sipil (minimal dua forum tahunan).
3. Monitoring Partisipatif Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk monitoring berbasis masyarakat melalui aplikasi mobile dengan keterlibatan masyarakat.
4. Kesimpulan Model ini menyediakan kerangka operasional bagi pemerintah daerah pesisir Indonesia untuk mewujudkan *blue governance* berkelanjutan melalui partisipasi publik yang inklusif dan adaptasi kebijakan berbasis keterlibatan masyarakat.

4. Kesimpulan

Studi ini menawarkan model blue governance bagi pemerintah daerah pesisir Indonesia berbasis telaah pustaka sistematis dengan tiga pilar: otonomi daerah, integrasi ekosistem, dan partisipasi publik inklusif. Partisipasi publik muncul sebagai pengungkit utama untuk menutup celah koordinasi antartingkat, mengurangi marginalisasi aktor lokal, dan memperkuat legitimasi kebijakan, termasuk melalui integrasi kearifan lokal.

Model operasional merekomendasikan Satgas Blue Governance (50% aparatur–50% masyarakat), integrasi ke RPJMD/RTRW dengan indikator minimal dua forum sipil tahunan, pemanfaatan dana desa untuk aksi biru, serta monitoring warga berbasis aplikasi. Implementasi menuntut penguatan kapasitas dan anggaran khusus; dengan pelibatan masyarakat di seluruh siklus kebijakan dan adaptasi pada risiko lokal, model ini menjadi acuan menuju tata kelola pesisir yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Acknowledgments: Terima kasih kepada seluruh civitas akademika Ilmu Administrasi Negara Negeri Makassar yang telah membantu menyelesaikan artikel ini.

Declaration of conflicting interests: 'Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Funding: 'Tidak ada dana yang diterima'.

Referensi

- Alfiandri, A., & Mayarni, M. (2023). Implementation model of governance policy for developing coastal border ecotourism in Indonesia. *BIO Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237004005>
- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39, 193–214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Anwar, M. S., Ruhtiani, M., & Hendriana, R. (2023). Carbon: Integrative management of coastal ecosystems based on regional autonomy. *Jambe Law Journal*. <https://doi.org/10.22437/jlj.6.2.185-204>
- Asnaedi, Winoto, J., Harianto, Sari, L. K., & Mustofa, F. C. (2025). Developing a protection design framework for the Bajo tribe's living space in Indonesia's coastal areas: An adaptation from Funaya Japan. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su17104306>
- Ayostina, I., Napitupulu, L., Robyn, B., Maharani, C., & Murdiyarso, D. (2022). Network analysis of blue carbon governance process in Indonesia. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.104955>
- Bennett, N. J., & Satterfield, T. (2018). Environmental governance: A practical framework. *Conservation Letters*, 11. <https://doi.org/10.1111/conl.12600>
- Contreras, C., & Thomas, S. (2019). The role of local knowledge in the governance of blue carbon. *Journal of the Indian Ocean Region*, 15, 213–234. <https://doi.org/10.1080/19480881.2019.1610546>
- Febrianti, M., Saefullah, A., Nurhayati, N., & Tohhiroh, T. (2024). Implementasi konsep ESG (environmental, social, and governance) dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan Indo Pasifik. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen Kewirausahaan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.61132/prosemnasimkb.v1i1.4>
- Ferrol-Schulte, D., Gorris, P., Baitoningsih, W., Adhuri, D., & Ferse, S. (2015). Coastal livelihood vulnerability to marine resource degradation. *Marine Policy*, 52, 163–171. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.026>
- Glaser, M., Breckwoldt, A., Carruthers, T., & al., et. (2018). Towards a framework to support coastal change governance in small islands. *Environmental Conservation*, 45, 227–237. <https://doi.org/10.1017/s0376892918000164>

- Hidayat, A. R. N. (2025). Strengthening village governance: A qualitative study of transparency, accountability, and participation in village fund management in Tappale Village, Libureng Subdistrict, Bone Regency. *Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)*, 2, 34–49. <https://doi.org/10.69816/jgd.v2i1.43956>
- Hudaya, K., & Idris, H. (2023). The potential of blue economy implementation for Indonesia's maritime transport. *Journal of Southeast Asian Studies*. <https://doi.org/10.22452/jati.vol28no2.2>
- Ikhsan, D. B., Hamzani, U., & Espa, V. (2024). Blue accounting literacy perspective on the tourism sector in Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i10-29>
- Kobayashi, M. (2023). Promoting sustainable fisheries and aquaculture. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1207. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1207/1/012006>
- Kunyati, S. A., Setiawan, A., & al., et. (2024). A model for sustainable city and community development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. <https://doi.org/10.24294/jipd9526>
- Marjani, Hasddin, Mirad, Asrul, & Murini. (2025). Blue economy and economic growth. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*. <https://doi.org/10.59065/jissr.v5i1.178>
- Meliala, A. (2024). Mapping effective multi regional treaties on blue economy. *Transnational Business Law Journal*. <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v5i1.1609>
- Morita, K., Okitasari, M., & Masuda, H. (2019). Analysis of national and local governance systems. *Sustainability Science*, 15, 179–202. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00739-z>
- Mujahidin, M., & Paramita, B. (2021). Zero waste pattern for SMEs in Indonesia. *Proceedings of MEBIC 2021*. <https://doi.org/10.4108/eai.24-9-2021.2314661>
- Nurhidayah, L., Davies, P., & al., et. (2022). Responding to sea level rise. *Maritime Studies*, 21, 339–352. <https://doi.org/10.1007/s40152-022-00274-1>
- Nurlinah, N., & Haryanto, H. (2020). Institutional mechanisms and civic forum in coastal village governance. *Public Policy and Administration*, 19, 76–85. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.19.3.27832>
- Partelow, S., Schlüter, A., & al., et. (2020). Environmental governance theories. *Ecology and Society*, 25, 19. <https://doi.org/10.5751/ES-12067-250419>
- Permani, R., Muflikh, Y., & Sjahrudin, F. (2024). Mapping the complex web of policies for seaweed industry development in Indonesia. *Ocean & Coastal Management*. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107464>

- Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 28, 1665–1685. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>
- Prihatiningtyas, W., Wahyuni, I., & al., et. (2024). Strengthening blue carbon ecosystem governance in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-085>
- Rangkuti, S. F., Sukardi, S., & Syafii, M. (2024). Analisis kebijakan dana desa dalam konsep blue economy. *Owner*. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1980>
- Razladova, O., & Nyoko, A. (2022). Blue economy development in Indonesia. *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*. <https://doi.org/10.35508/jom.v15i1.6516>
- Rölfer, L., Celliers, L., & Abson, D. J. (2022). Resilience and coastal governance. *Ecology and Society*, 27, 40. <https://doi.org/10.5751/ES-13244-270240>
- Safitri, D. P., Hendrayady, A., & al., et. (2024). Reconfiguration of coastal settlement policy in blue economy paradigm. *BIO Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202413404006>
- Sari, D. N., & Oktora, S. I. (2025). Construction of blue economy development index. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*. <https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss1pp603-616>
- Sidik, F., Lawrence, A., & al., et. (2023). Blue carbon: A new paradigm of mangrove conservation. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105388>
- Singh, G., Cottrell, R., Eddy, T., & Cisneros-Montemayor, A. (2021). Governing the land-sea interface to achieve sustainable coastal development. *Frontiers in Marine Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.709947>
- Sofiyah, E., & Suryawan, I. (2025). Adaptive management for coastal sanitation governance in Jakarta. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*. <https://doi.org/10.12962/j25481479.v10i2.6401>
- Sungkawati, E. (2024). Opportunities and challenges: Adopting “blue-green economy” terms. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i1.333>
- Supriyanto, E. (2022). Blue tourism. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*. <https://doi.org/10.47608/jki.v16i22022.138-148>
- sustainability, H. (2023). Integrating Javanese tri dharma sambernyawa philosophy into regional governance for blue economy advancement. *Futurity Philosophy*. <https://doi.org/10.57125/fp.2023.12.30.02>
- Talib, N. L. A., Utomo, A., Barnett, J., & Adhuri, D. (2022). Three centuries of marine governance in Indonesia. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105171>

- Tambun, R., Sutrisno, & Prasutiyon, H. (2025). Sustainable blue economy establishes social justice. *International Journal of Integrative Sciences*. <https://doi.org/10.55927/ijis.v4i2.88>
- Tarigan, M. I., & Ferdinanto, T. (2024). Strong sustainability and ocean justice. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01703.5>
- Ujianti, R., Novita, M., & al., et. (2025). Toward sustainable coastal management. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i9.18502>
- Wang, Z. (2025). Current status and trends of blue economy development in Indonesia. *Advances in Economics and Management Research*. <https://doi.org/10.56028/aemr.14.1.282.2025>
- Wardhani, L., Diamantina, A., & Rafsanjani, L. H. (2025). Framework for biodiversity conservation governance. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-55>
- Wuwung, L., McIlgorm, A., & Voyer, M. (2024). Sustainable ocean development policies in Indonesia. *Frontiers in Marine Science*. <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1401332>.